



Pemda DIY Persilakan PKL Malioboro Mengadu ke LBH

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY mempersilakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro untuk melaporkan rencana relokasi kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Pihaknya menegaskan relokasi ini ditujukan untuk menyiapkan tempat berjualan yang layak dan legal.

Perlu diketahui, sejumlah PKL pun tercatat telah melakukan pengaduan terkait proyek penataan sumbu filosofis. Mereka pun menyikapinya dengan membuka posko pengaduan, bagi para pelaku usaha yang terdampak kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Basakara Aji, tak memperlakukan langkah yang ditempuh para PKL. Aji menganggap bahwa PKL saat ini kebanyakan berjualan di tempat yang tidak

permanen sehingga perlu adanya upaya penataan.

"Ya pada prinsipnya PKL itu bisa mendapat tempat berusaha yang lebih layak, yang legal. Tidak menepati yang tidak permanen. Itu kan tidak bisa tenang dalam melakukan usaha," jelas Aji, Rabu (12/1).

Selain itu, nantinya PKL yang direlokasi juga dibebaskan dari tarif bulanan. Pemerintah juga akan berusaha memenuhi segala kebutuhan pedagang termasuk untuk mempromosikan spot berbelanja baru kepada wisatawan.

"Kita siapkan tempat, dari sisi pembiayaan juga tidak kita terapkan tarif. Jadi Pemda DIY memberlakukan PKL di Malioboro bukan tanpa solusi kita siapkan solusinya, tidak asal usir," jelasnya.

Kendati demikian, jika

ada pihak yang menganggap pemerintah melanggar hukum, Aji mempersilakan untuk melakukan pelaporan. "Tapi kalau masih ada yang merasa ini sesuatu yang salah secara yuridis dan mengadu ya kita ikuti saja," tandasnya.

Staf Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua, sebelumnya mengatakan, pihaknya memandang upaya relokasi dilakukan secara tergesa-gesa, dan tanpa pertimbangan yang matang. Sebab, pelaksanaannya ditempuh, ketika pandemi Covid-19 masih dirasakan dampaknya oleh para pedagang.

"Prinsip partisipasi masyarakat sudah diabaikan. Apalagi, kebijakan dilakukan di tengah pandemi, saat perekonomian warga ini belum pulih sepenuhnya," kata Era. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005